

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya menciptakan ketahanan pangan di Provinsi Jambi memerlukan perencanaan kolaboratif yang melibatkan berbagai pihak, pemerintah daerah tidak memberikan ruang yang luas bagi *stakeholder* lain diantaranya petani, peternak ataupun masyarakat dalam memberikan *inside* untuk menyusun rencana yang efektif mengatasi persoalan pangan, seperti tidak terlibatnya petani dan peternak dalam proses dialog, membangun kepercayaan oleh aktor lapangan yang masih kurang memadai karena ketidakterlibatan dalam rencana yang sudah dibuat, harus melihat kembali kondisi infrastruktur pertanian dan peternakan memadai atau tidak untuk hasil produksinya, kemudian alih fungsi lahan dan bantuan tidak terkoordinasi dengan baik sesuai kondisi realnya. Selanjutnya efektivitas dari kolaborasi yang dilakukan sampai dengan implementasi program harus diikuti sertakan dengan aktor pelaksana lapangan agar kebijakan dapat berjalan inklusif dan terarah. Melalui pendekatan *collaborative planning*. Penerapan *Collaborative Planning* dalam menciptakan ketahanan pangan di Provinsi Jambi telah dilakukan melalui berbagai tahapan strategis, seperti membangun dialog antar pemangku kepentingan, memperkuat kepercayaan, identifikasi potensi dan permasalahan, penguatan kelembagaan, penyusunan komitmen bersama, implementasi kebijakan, hingga proses evaluasi.

Peran lembaga-lembaga pemerintah seperti BAPPEDA, Dinas Ketahanan Pangan, dan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan sangat penting dalam mendorong koordinasi lintas sektor, meskipun implementasinya masih memerlukan penguatan sinergi dan keterlibatan aktif masyarakat. Pendekatan *Collaborative Planning* terbukti mampu menghadirkan solusi yang lebih inklusif dan responsif terhadap dinamika lokal, namun masih perlu penguatan komitmen bersama dan kebijakan yang berkelanjutan agar tujuan ketahanan pangan di Provinsi Jambi dapat tercapai secara optimal. Dengan demikian, kolaborasi yang efektif antar pemangku kepentingan menjadi kunci dalam menjawab kompleksitas persoalan pangan di tingkat daerah.

4.2 Saran

Berdasarkan temuan penelitian ini, disarankan agar Pemerintah Provinsi Jambi bahwa, karena tidak terlalu dilibatkan *stakeholder* lain harus meningkatkan koordinasi antar instansi melalui penerapan perencanaan kolaboratif yang lebih terarah dan terorganisir melalui SK penguatan percepatan ketahanan pangan terlembaga harus lebih terarah dan berpusat kepada kelompok petani dan peternak. Kemudian syarat-syarat normatif lainnya seperti bantuan terhadap petani dan peternak harus difokuskan, kesejahteraan petani dan peternak dalam produksi kepasar harus dipastikan. Namun, hal yang paling penting dalam perencanaan kolaboratif ini yaitu peran petani dan peternak harus terlembaga dengan dibuktikan SK Tim yang tidak hanya bertuju ke instansi saja, juga diperlukan guna memperkuat proses perumusan, pelaksanaan, serta evaluasi kebijakan ketahanan pangan secara lebih optimal. Selain itu, penetapan lahan pertanian tetap perlu segera diwujudkan untuk menekan konversi lahan yang kian meluas ini sangat berpengaruh kepada produksi. Pemerintah daerah diharapkan dapat lebih aktif melibatkan petani dan masyarakat dalam proses perencanaan.